

JURNAL

ITERPRETASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBENTUK PERSERO



Disusun Oleh :

WILIBRODUS HARUM

NPM : 110510561

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

ITERPRETASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBENTUK PERSERO



Disusun Oleh :

WILIBRODUS HARUM

NPM : 110510561

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Pada Tanggal *27 Januari 2015*

Dosen Pembimbing



DR. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DALAM BUMN PERSERO

Oleh: Wilibrodus Harum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pembimbing: Al. Wisnubroto

ABSTRACT

The element of country's financial loss which is the offence group found an article 2 and article 3 act No. 31 of 1999 on the eradication of corruption, in its application often call up problem, especially relating to corruption case which happened in the state owned enterprises limited. The presence of double standard in legislation leads to polemic whether the country's financial investing in the state Owned Enterprises Limited is still becoming a part of country's financial or it is changing to the State Owned Enterprises Limited's financial. That polemic becomes the main problem on this research. Moreover, the researcher would like to analyze how the judge interpreted the element of prejudicing the country's financial of the case happening in the state owned enterprises limited.

The problem whether the state owned Enterprises Limited's financial is part of country's financial or not, normative-juridically has been answered by the constitutional Court Ruling Republic Of Indonesia No. 48/PUU-XI/2013 and the constitutional court Ruling of Indonesia No. 62/PUU-IX/2013 which essentially states that the states Owned Enterprises Limited's financial is still a part of the country's financial. Before the constitutional court issued ruling that the country's financial in the state Owned Enterprises Limited is still a part of country's financial, the judge in the Court of Corruption case often interpret the element "harm the country's financial differently or diverse so that it creates a disparity of the judge's Decision.

Keyword: interpret, country's financial loss, country's financial State Owned Enterprises Limited

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini korupsi di Indonesia marak terjadi, salah satunya terjadi di BUMN berbentuk Persero. Ketika korupsi terjadi BUMN berbentuk

Persero, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah apakah keuangan BUMN Persero bagian dari keuangan Negara atau bukan, karena hal ini erat kaitannya dengan salah satu Unsur kerugian keuangan¹ Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Status keuangan yang ada dalam BUMN Persero seringkali menjadi multi tafsir. Perbedaan penafsiran terkait status keuangan Negara yang ditanamkan dalam BUMN khususnya berbentuk Persero tidak lepas dari inkoherensi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN, karena terjadi perbedaan prinsip pada kedua Undang-Undang itu. Prinsip Undang-Undang PTPK menghendaki kerugian BUMN juga kerugian negara, sedangkan prinsip Undang-Undang BUMN kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN sendiri dan bukan kerugian Negara.

¹ Unsur merugikan keuangan negara merupakan salah satu dari beberapa jenis delik yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah secara yuridis keuangan BUMN Persero dapat disebut sebagai keuangan Negara?
2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap unsur kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada BUMN Persero.

II. Pembahasan

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif yuridis pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh UU PTPK adalah tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.² Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada angka 3 disebutkan antara lain bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 12B.

Dengan demikian, sesudah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi

² R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindak pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 13, dan Pasal 14.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti adalah sebagai berikut:⁴

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan.
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu melawan hukum. “melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

³ *Ibid.*

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm.18

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum Tipikor adalah⁵:

- a. Korporasi
- b. Pegawai Negeri, dan
- c. Setiap Orang

B. Keuangan Negara dalam BUMN Persero

1. Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁶

b. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Dalam Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur ruang lingkup keuangan Negara yang salah satunya

⁵ *Ibid*, hlm. 143

⁶ Lihat pengertian keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

meliputi: Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah.⁷

c. Perihal Kerugian Keuangan Negara

Pengertian keuangan Negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan Negara atau dapat merugikan Negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur: *pertama*, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan *kedua*, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain atau korporasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. BUMN Persero

a. Pengertian BUMN Persero

⁷ Lihat pengertian keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menurut Pasal 1 angka 2 Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

b. Maksud dan tujuan BUMN Persero

Menurut Pasal 12 UU BUMN ditentukan maksud dan tujuan khusus pendirian Persero adalah:

1. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

c. BUMN Persero Sebagai Badan Hukum

Persero sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Pernyataan Perseroan sebagai badan hukum dapat ditemukan dalam rumusan pengertian Perseroan Terbatas dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang selengkapnya menyatakan: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

d. Modal BUMN Persero

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN mendapatkan modal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Artinya adalah pemisahan kekayaan Negara yang dari anggaran, pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaanya tidal lagi didasarkan pada system anggara pendapatan dan belanja Negara, namun pembinaan dan pengeloanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

e. Kekayaan Negara dipisahkan pada BUMN Persero

Dalam Pasal 1 angka (10) UUBUMN yang dimaksud dengan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroaan Terbatas lainnya. Selanjudnya di dalam Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa modal BUMN merupakan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

f. Status Yuridis keuangan Negara dalam BUMN Persero

Perdebatan tentang apakah kekayaan negara yang dipisahkan itu masih menjadi bagian dari kekayaan negara atau bukan, harus diberhentikan mulai dari sekarang, sebab secara normatif yuridis,

kekayaan negara yang dipisahkan itu masih merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan negara dan penjelasan UU PTPK. Perdebatan ini juga harus diakhiri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XI/2013⁸ yang pada pokoknya menyatakan kekayaan negara yang diinvestasikan dalam BUMN seperti Persero tetap menjadi bagian dari keuangan negara.

Di sisi lain juga bahwa status pegawai dalam BUMN adalah pegawai negeri sipil yang mana menerima gaji atau upah dari negara. Hal itu dapat dilihat pengertian pegawai negeri dalam UUPTK, yang mengatakan pegawai negeri adalah meliputi orang yang menerima gaji ataupun upah dari negara atau daerah dan atau orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi dari keuangan negara menerima batuan dari keuangan negara atau daerah. Dengan demikian posisi BUMN seperti Persero, hanyalah sebatas mengelola keuangan negara, bukan berarti begitu negara menginvestasikan modalnya pada BUMN seperti Persero, modal tersebut bukan lagi menjadi milik negara sebab keuangan yang ada dalam BUMN seperti Persero bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi, maupun penerimaan negara bukan pajak⁹.

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XI/2013

⁹ Tjandra, Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT.Grasindo, Jakarta.

C. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara yang terjadi di BUMN Persero

1. Analisis putusan hakim dalam Perkara No. 9/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk¹⁰

Unsur merugikan Keuangan Negara yang merupakan salah satu kelompok delik yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dalam kasus tersebut di atas oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum diperdebatkan. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan benar melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sebaliknya penasihat hukum dalam pembelaanya menyatakan keuangan PLN yang merupakan BUMN berbentuk Persero bukanlah kekayaan Negara, sehingga demikian unsur merugikan keuangan Negara tidak terbukti.

Terhadap dua pandangan hukum yang berbeda tersebut, hakim dalam memutus perkara tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003, Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006, Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013, yang pada pokoknya semua mengatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan menjadi modal di BUMN tetaplah

¹⁰ Baca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 9/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk¹⁰

menjadi/merupakan keuangan negara, sedangkan PT PLN (Persero) adalah juga merupakan BUMN yang sahamnya 100% berasal dari pemerintah, maka dapatlah dikatakan bahwa anggaran yang ada di PT PLN (Persero) juga merupakan keuangan negara.

Dengan melihat pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim dalam memutus perkara yang terjadi di PLN (Persero) menggunakan penafsiran sistematis. Dikatakan menggunakan penafsiran sistematis adalah karena dalam pertimbangannya tersebut, untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara, hakim tidak hanya berdasarkan pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tetapi juga menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-undang lain seperti Pasal 6 UU No 15 Tahun 2016 serta Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam menafsirkan unsur merugikan keuangan Negara oleh hakim dalam perkara tersebut adalah metode penafsiran sistematis.

Dalam pertimbangannya tersebut hakim menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya serta Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas apakah keuangan dalam BUMN Persero dalam hal ini PLN, bagian dari keuangan Negara atau bukan yang kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan, maka terbukti benar bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sehingga unsur

“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi.

2. Analisis Putusan hakim dalam perkara No. 065/Pid.b/2010/PN.Sby¹¹

Dalam pertimbangannya, untuk membuktikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan/bukanlah sebagai suatu perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan terdakwa adalah jelas melawan hukum. Hal itu dapat dilihat ketika dalam penunjukan PT. Indoglas sebagai agen pemasaran tunggal tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris PT Iglas serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, keputusan itu juga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT Iglas Nomor 104/KTPS/DIR/10/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang pengadaan barang dan jasa perusahaan milik negara.

Selain itu juga, dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof.Dr.Arifin P.Soeria Atmadja Secara yuridis PT. Iglas (Persero) sebagai badan hukum perdata dan secara yuridis keuangan PT.Iglas (Persero) bukan merupakan keuangan Negara. Dengan demikian

¹¹ Baca Putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 065/Pid.b/2010/PN.Sby

tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban tidak tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan APBN dan semua ketentuan perundang-undangan keuangan Negara dan status badan hukum PT. Iglas (Persero) dan PT. Indoglas adalah sama yakni badan hukum perdata bukan instansi Pemerintah. Ketentuan yang berlaku bagi hubungan hukum antara PT.Iglas (Persero) dan PT. Indoglas adalah hubungan perdata dan tidak ada kaitannya dengan ketentuan APBN maupun ketentuan mengenai Keuangan Negara termasuk Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang oleh PT.Iglas (Persero) bukan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN tetapi dibiayai oleh PT.Iglas (Persero) sebagai badan hukum perdata yang bukan Instansi Pemerintah. Pertimbangan tersebut menyimpangi apa yang secara tegas ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dengan mendasarkan kepada keterangan ahli Prof.Dr.Arifin P. Soeria Atmadja bahwa keuangan PT.Iglas (Persero) bukan merupakan keuangan Negara, padahal Keuangan Negara tidak semata diartikan sebagai APBN karena APBN bukan unsur dari Pasal 2 maupun Pasal 3 UUPTPK.

D. Penafsiran Hakim terkait unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di BUMN Persero

Unsur merugikan keuangan Negara sebagai salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi yang merupakan kelompok delik yang terdapat

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero ditafsirkan berbeda-beda, padahal, jelas secara normatif yuridis bahwa keuangan BUMN Persero adalah keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam UUKN maupun UUPTPK, namun dalam praktek Peradilan ternyata keuangan Negara yang diinvestasikan di BUMN Persero masih multitafsir. Hal itu dapat diamati dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk dengan Putusan No. 065/Pid.b/2010/PN.Sby.

Perbedaan cara pandang mengenai keuangan Negara yang diinvestasikan dalam BUMN Persero tidak lepas dari inkoherensi antara peraturan Perundang-Undangan. Perbedaan itu sampai dalam tataran praktis di peradilan. Misalnya dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk, Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang No 17 Tahun 2003, Pasal 6 UU No 15 Tahun 2006 serta Putusan Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keuangan yang ada dalam BUMN Persero adalah keuangan Negara. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keuangan Persero bukanlah keuangan Negara, karena Secara yuridis Persero sebagai badan hukum perdata dan secara yuridis keuangan Persero

bukan merupakan keuangan Negara dengan demikian tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban tidak tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan APBN dan semua ketentuan perundang-undangan keuangan Negara.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis status keuangan Negara yang diinvestasikan dalam BUMN Persero adalah bagian dari keuangan Negara. Hal tersebut karena keuangan yang ada dalam BUMN Persero bersumber dari APBN sehingga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, sebab uang tersebut berasal dari uang rakyat. Jadi, posisi BUMN Persero hanya sebatas mengelola saja namun tidak menghilangkan karakteristiknya sebagai uang Negara. Selain itu status keuangan Negara dalam BUMN Persero juga secara yuridis sudah diperkuat dengan Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keuangan Negara yang diinvestasikan dalam BUMN tetaplah bagian dari keuangan Negara.
2. Penafsiran Unsur merugikan keuangan Negara yang merupakan kelompok delik yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN

Persero ditafsirkan secara berbeda-beda. Ada yang menafsirkan unsur kerugian keuangan Negara bisa diterapkan terhadap kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero dan sebaliknya ada yang menafsirkan unsur kerugian keuangan Negara tidak bisa diterapkan terhadap kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status yuridis keuangan Negara dalam BUMN Persero harus bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam mengadili setiap perkara yang terjadi di BUMN Persero, seperti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta, agar setiap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara tetap dijerat dengan UUPTPK.
2. Bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero disarankan untuk tidak memberikan penafsiran bahwa keuangan yang ada dalam BUMN Persero bukan bagian dari keuangan Negara yang berujung pada penerapan unsur kerugian keuangan Negara tidak bisa menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara karena secara yuridis normatif sudah jelas bahwa keuangan BUMN Persero bagian dari keuangan Negara, sehingga tidak ada lagi putusan bebas bagi pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan revisi, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.

Djafar Saidi, M., 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hal 15-16

Syamsu
din, Aziz *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasyim Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Rajagrafondo Persada, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Pramono, Nindyo, 2006, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN*, dalam Sri Rejeki H. dkk (ed), tanpa penerbit
Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

Syamsudin, Aziz *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT.Grasindo, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, hlm. 108

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Makalah dan Jurnal

Gatot Supramono, 2008, *Kedudukan Bumh Dalam Hubungannya Dengan Keuangan Negara Dan Pengaruhnya Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, makalah disajikan dalam seminar Nasional di Banjarmasin 27 agustus 2007.

Soepardi Eddy Mulyadi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah pada fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm 3

Internet:

<http://www.lontar.ui.ac.id>, diunduh pada 26 agustus 2014.